LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

KECAMATAN REMBANG

KABUPATEN REMBANG

JL. PEMUDA KM 2 REMBANG

Telp. (0295) 691690

Website. **http://kecrembang.rembangkab.go.id**

e-mail : kecrembang@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Rembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, Kecamatan Rembang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawab-kan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rembang, 27 Maret 2025

CAMAT REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19821029 200112 1 00 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kecamatan Rembang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”
   - Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 135 dengan realisasi 4,47 dari target 3,3 mengindikasikan bahwa mutu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan kategori yang sangat tinggi.
   - Capaian sasaran strategis tercapainya kwalitas dan kuantitas Pelayanan Terhadap masyarakat sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan yaitu mencapai 109 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasaan Masyarakat Dan Bahwa Kecamatan Rembang Mendapatkan Nilai 91,63 Mengindentifikasikan bahwa mutu atas Pelayanan Publik kepada Masyarakat dengan kategori sangat tinggi dari target 84 bahwa Pelayanan di Kecamatan Rembang memiliki Kinerja Baik
2. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Rembang ditinjau dari sasaran :
   - Belum semua aparat Kecamatan Rembang mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
   - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan
   - Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan
   - Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Rembang ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat.
2. Perlunya meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa
3. Perlunya meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya.
4. Perlunya Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 2

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

1.2.2 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 14

1.2.3 Aspek Strategis Organsisasi & Permasalahan Utama 17

1.2.4 Dukungan Sumber Daya Manusia 18

1.2.5 Dukungan Sarana Prasarana 20

1.2.6 Tindaklanjut atas laporan evaluasi SAKIP 2023 25

1.2.7 Anggaran 36

1.3 Dasar Hukum 36

1.4 Sistematika Laporan Kinerja 37

BAB II PERENCANAAN KINERJA **39**

2.1 Rencana Strategis 39

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 40

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 45

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **59**

3.1 Capaian Kinerja 59

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 59

3.1.2 Membandingkan antara target & realisasi tahun pelaporan 60

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir....61
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi....61
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)....63
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan....64
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya....67
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 75

3.2 Realisasi Anggaran....83
3.3 Prestasi yang di capai....85
3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan....86

BAB IV PENUTUP 87
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024 3
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 6
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 6
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah 7
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 8
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah (bila ada) 9
Tabel 2.7 Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 9
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 12
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 13
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 13
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota 14
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 15
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 15
Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 16
Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kecamatan Rembang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Kecamatan Rembang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Kecamatan Rembang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan. berkewajiban mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayananpublik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan olehPerangkat Daerah di Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidakdilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan Fungsi Sekretariatan; dan pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
   a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelurahan Terdiri dari :
   1). Sekretariat
   2). Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
   3). Seksi ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Camat
   a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, ken.asama, kearsipan, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan
5. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kelja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang nrilik daerah, kearsipan, kepegawalan, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasiandanketatalaiksanaun,kerumahtanggaan,barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
d. Evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan , kerumahtanggaan, barang milik daerah, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan Publik

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
d. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal dt wilayah Kecamatan;
e. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
f. Pengoordinasian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan yang terkalt dengan pelayanan perizinan non usaha;
i. Pelaksanaan urusan pemerintahan non perizinan;
j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan
b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan;
e. Fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan ;
f. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
g. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
h. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
i. Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
j. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
e. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
f. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
g. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
h. Fasilitaisi sinkronisasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan;
i. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
j. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
k. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

l. Fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
m. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelakcanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Sinergitas dengan POLRI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
c. Hamonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
e. Pembinaan wawasrm kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
f. Fasilitasi koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
g. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
h. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional;
i. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan;
j. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
k. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Lurah

Tugas Pokok : membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat ,pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitasi umum dilingkungan kelurahan serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretaris Lurah

Tugas pokok

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, keijasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
b. pengoordinasian meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
c. pelaksanaan dan pemantauan kebijakan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;
d. evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan,

pembinaan ketatausahaan, produk hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kelurahan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

11. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum;
b. penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
c. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d. pengoordinasian kegiatan pemilu dan kelembagaan masyarakat;
e. pelayanan perizinan non berusaha serta non perizinan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

12. Seksi Ekonomi,pembangunan dan kesejahteraan Rakyat

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

a. fasilitasi kegiatan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat;
c. pelayanan perizinan nikah, talak, cerai dan rujuk;

d. pembinaan kehidupan keagamaan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok :

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Kecamatan Rembang . Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Rembang .

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rembang

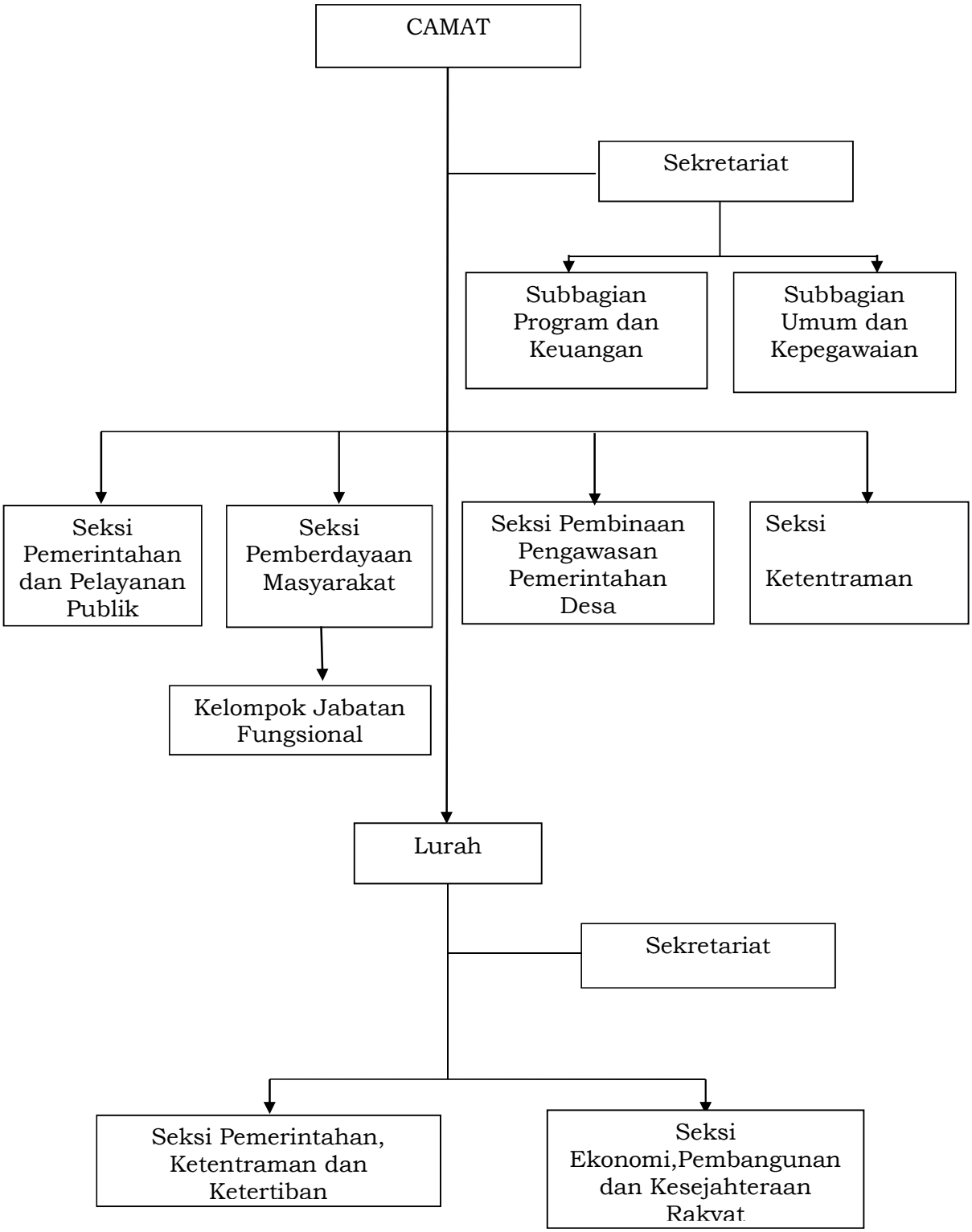

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021

1.2.2 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja *(Performance Based Organization)* yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021–2026. Kecamatan Rembang dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

CASCADING KECAMATAN KABUPATEN REMBANG
BERDASARKAN PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021

CAMAT		
TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik / IPP	3.2

CAMAT		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat / IKM	83.5

SEKCAM		
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	NILAI SAKIP OPD	61

PROGRAM I	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100%

PROGRAM II	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%
	Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp.20.000.000,-	22 desa

PROGRAM III	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%

PROGRAM V	INDIKATOR	TARGET
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	95%

KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	% Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100%

SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	61

SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 paket
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 pokmas
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100%

SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34 laporan

KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70

SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	34
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34

KA SUB BAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang
Pelaksanaan Prasatuwahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Prasatuwahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan

KA SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondidi Baik	85%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%

SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dok
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
Pengadaan Mebel (Jumlah Paket Mebel yang Disediakan)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dilayarkan Pejabatnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dilayarkan Pejabatnya	16
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lastrik yang Disediakan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12

1.2.3. Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama

Aspek Strategis Kantor Kecamatan Rembang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Rembang sebagai pelayanan masyarakat yang representatif.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi untuk kepentingan publik.

Permasalahan Utama

1. Kurangnya sarana dan prasarana (Komputer beserta Perangkatnya) sehingga memperlambat Kinerja Administrasi Perkantoran.
2. Sarana Prasarana Gedung kurang memadai (rusak) serta fasilitas kenyamanan untuk kerja kurang memadai (AC rusak)
3. Kurangnya Jumlah Pegawai di Kantor Kecamatan Rembang (Pelaksana) sehingga mengurangi kualitas dan ketepatan waktu kinerja.
4. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang dekat dengan Desa Tidak diberikan Kewenangan dalam Tugas Pencatatan Kependudukan, serta pengelolaan Anggaran Pencatatan Kependudukan, hanya sebagai Pembantu/tangan panjang kantor Dindukcapil dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya, sehingga Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan Kurang Optimal.
5. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat kecamatan Rembang dalam membayar pajak sehingga pembayaran pajak belum tepat waktu (mundur dari batas waktu yang ditentukan).
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamtibmas
7. Masih kurangnya kesadaran Petugas Pemugut PBB Desa/Rayon untuk menyampaikan PBB tepat waktu.

1.2.4 Dukungan Sumber Daya Manuasia

1.2.4.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai Kecamatan Rembang per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 79 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN(%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	30	56,6	37,9	21	80,7	26,6
2	Perempuan	23	43,4	29,1	5	19,2	6,3
Jumlah		**53**	**100**	**67**	**26**	**100**	**32,9**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**79 Pegawai**					

Sumber: Kecamatan Rembang, Desember 2024

Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Rembang tahun 2024 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 79 pegawai terdiri dari 53 orang ASN (67%) dari total pegawai dan 26 orang non ASN (32,9%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Rembang. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Rembang adalah laki laki dengan jumlah 30 orang (37,9%) dari total seluruh pegawai yang terdiri ASN .

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Kecamatan Rembang
berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN(%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap NonASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
	Perguruan Tinggi						
1	S2	5	9,4	6,3			
2	S1	26	49,1	32,9	1	3,8	1,3
3	D3	4	7,5	5,1	1	3,8	1,3

	Bukan Perguruan Tinggi						
4	SMA	18	33,9	22,8	16	61,5	12,9
5	SMP	0	0	0	5	19,2	6,3
6	SD	0	0	0	3	11,7	3,8
Jumlah		**53**	**100**	**67,1**	**26**	**100**	**25,6**
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)		**79 Pegawai**					

Sumber: Batzetting Kecamatan Rembang, Desember 2024

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2024 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 18 orang (33,9%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sejumlah 5 orang (9,4%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah adalah SD sejumlah 3 orang (11,7 %) dari jumlah pegawai ASN dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S1 sejumlah 1 orang (3,8%) dari jumlah pegawai ASN dan nonASN. Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 yaitu berjumlah 27 orang terdiri dari 26 orang ASN dan 1 orang non ASN atau 32,9% dari seluruh jumlah pegawai.

Tabel 3.3

Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Rembang Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tahun 2023 dan 2024

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2023	th. 2024		th. 2023	th. 2024
1	**Golongan IV**	**2**	**2**	**III**	2	2
	IV/c	-	-	-	-	-
	IV/b	1	1	III/a	1	1
	IV/a	1	1	III/b	1	1
2	**Golongan III**	**45**	**44**	**IV**	34	34
	III/d	13	13	IV/a	11	11
	III/c	14	13	IV/b	23	23
	III/b	10	10			
	III/a	8	8			
3	**Golongan II**	**7**	**7**			
	II/d	3	3			
	II/c	4	4			
	II/b	-	-			
	II/a	-	-			
Jumlah						

Jumlah Seluruh Pegawai(ASN)	**54**	**53**		**36**	**36**

Sumber: Kecamatan Rembang, des 2023 & des 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.4 diatas jumlah pegawai Kecamatan Rembang berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III berjumlah 44 orang dari seluruh jumlah pegawai.

1.2.5.Dukungan Sumber daya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Rembang memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Rembang

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
I	**KECAMATAN REMBANG**				
1	Portable Generating Set	1	1	0	
2	Sepeda Motor	13	13	0	
3	Station wagon	2	2	0	
4	Alat angkutan Darat bermotor (tosa)	5	5	0	
5	Penyemprot otomatis	4	4	0	
6	Lemari kayu	18	18	0	
7	Kursi Kayu	26	26	0	
8	Meja Rapat	26	26	0	
9	Meja Podium	1	1	0	
10	Meja ½ Biro	6	6	0	
11	Kursi rapat	130	130	0	
11	Kursi Tamu	2	2	0	
12	Kursi Putar	8	4	4	
13	Kursi Biasa	20	20	0	
14	Bangku Tunggu	2	2	0	
15	Meja Kompiuter	6	6	0	
16	Lemari Es	1	1	0	
17	Ac Sepilit	12	12	0	

18	Kipas angin	6	6	0	
19	Radio	2	2	0	
20	Televisi	2	2	0	
21	Sound System	2	2	0	
22	Megaphone	1	1	0	
23	Handy Cam	1	1	0	
24	Meja Kerja Pejabat Eslon IV	10	10	0	
25	Meja Kerja Pejabat Lain	1	1	0	
26	Kursi Kerja Pejabat Eslon III	1	1	0	
27	Kursi Kerja Pejabat Lainya	1	1	0	
28	Incubator	2	2	0	
32	Layar film/projector	1	1	0	
33	Vidio Confrence	1	1	0	
34	PC Unit	5	3	2	
35	Laptop	13	10	3	
36	Notebook	1	1	0	
37	Printer	12	7	5	
II	**KELURAHAN KUTOHARJO**				
1	Portable Genereting Set	1	1	0	
2	Sepeda Motor	3	3	0	
3	Penyemprot Otomatis	4	4	0	
4	Penyemprot Tangan	1	1	0	
5	Lemari Kayu	5	5	0	
6	Filing cabinet besi	2	2	0	
7	Papan Visual / Papan Nama	1	1	0	
8	Alat Kantor Lainya	14	14	0	
9	Meja rapat	4	4	0	
10	Meja podium	1	1	0	
11	Meja ½ biro	10	10	0	
12	Kursi tamu	1	1	0	
13	Kursi biasa	6	6	0	
14	Meja Kompiuter	1	1	0	
15	Lemari es	1	1	0	
16	AC spilit	5	5	0	
17	Kipas angin	4	4	0	
18	Rice Coker (alat dapur)	1	1	0	
19	Televisi	2	2	0	
20	Soundsystem	1	1	0	
22	Wireles	2	2	0	
23	Megaphone	4	4	0	
24	Mickrophone	1	1	0	
25	Tangga aluminum	1	1	0	
26	Dispenser	1	1	0	
27	Handycam	1	1	0	

28	Alat Pemadam /Portable	3	3	0	
29	Kursi Kerja Pejabat Eslon IV	1	1	0	
30	Slide Projektyor	3	3	0	
33	PC Unit	1	1	0	
34	Laptop	6	6	0	
35	Printer	3	3	0	
III	**KELURAHAN MAGERSARI**				
1	Sepeda motor	3	3	0	
2	Alat angkutan darat lainya	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	2	2	0	
4	Lemari kayu	2	2	0	
5	Meja rapat	1	1	0	
6	Meja ½ Biro	4	4	0	
7	Kursi Tamu	1	1	0	
8	Kursi Putar	1	1	0	
9	Kursi Biasa	2	2	0	
10	Lemari es	1	1	0	
11	Ac Sepilit	3	3	0	
12	Souns System	1	1	0	
13	Kursi Kerja Pejabat eslon IV	4	4	0	
19	Layar Film /Projektor	1	1	0	
20	PC Unit	1	1	0	
21	Laptop	5	5	0	
22	Printer	3	3	0	
IV	**KELURAHAN PACAR**				
1	Sepeda motor	3	3	O	
2	Alat angkutan darat bermotor lainya	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	2	2	0	
4	Lemari kayu	2	2	0	
5	Meja rapat	1	1	0	
6	Meja ½ biro	3	3	0	
7	Kursi putar	1	1	0	
8	Kursi biasa	2	2	0	
9	AC Split	3	3	0	
10	Kompor gas (alat dapur)	1	1	0	
11	Televisi	1	1	0	
12	Amplifer	1	1	0	
13	Saoundsistem	1	1	0	
14	Michrophone	1	1	0	
15	Dispenser	1	1	0	
16	Pompa Air	1	1	0	

17	Laptop	3	3	0	
18	Printer	3	3	0	
V	**KELURAHAN SIDOWAYAH**				
1	Sepeda motor	3	3	0	
2	Penyemprot otomatis	5	5	0	
3	Mesin ketik	1	1	0	
4	Lemari kayu	1	1	0	
5	Rak kayu	4	4	0	
6	Meja rapat	1	1	0	
7	Meja ½ biro	7	7	0	
8	Kursi Tamu	1	1	0	
9	Kursi Putar	1	1	0	
10	Kursi biasa	2	2	0	
11	sofa	1	1	0	
12	Kipas Angin	3	3	0	
13	Kompor gas (alat dapur)	1	1	0	
14	Soundsystem	21	21	0	
15	Wireles	1	1	0	
16	Megaphone	1	1	0	
17	Microphone	1	1	0	
18	Alat Pemadam Portable	2	2	0	
19	Kursi Kerja Pejabat eslon IV	3	3	0	
20	Layar film/ proyektor	1	1	0	
21	Laptop	5	5	0	
22	Printer	5	5	0	
VI	**KELURAHAN TANJUNGSARI**				
1	Sepeda Motor	3	3	0	
2	Alat angkutan darat bermotor lainya	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	2	2	0	
4	Lemari Kayu	1	1	0	
5	Meja ½ biro	4	4	0	
6	Kursi Putar	1	1	0	
7	Kursi Biasa	2	2	0	
8	Soaund system	1	1	0	
9	Wireles	1	1	0	
10	Layar Film /Projektor	1	1	0	
11	Peralatan Olahraga lainya	2	2	0	
12	P.C Unit	1	1	0	
13	Laptop	4	4	0	
14	Printer	3	3	0	

VII	**KELURAHAN LETEH**				
1	Sepeda motor	4	4	0	
2	Alat angkutan darat bermotor lainya	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	3	3	0	
4	Lemari kayu	2	2	0	
5	Rak kayu	1	1	0	
6	Lemari Kaca	2	2	0	
7	Meja Rapat	2	2	0	
8	Meja Panjang	1	1	0	
9	Meja ½ Biro	7	7	0	
10	Kursi rapat	4	4	0	
11	Kursi Putar	1	1	0	
12	Kursi biasa	2	2	0	
13	Bangku Tunggu	2	2	0	
14	Lemari es	1	1	0	
15	Ac sepilit	5	5	0	
16	Kipas angin	2	2	0	
17	Tiang air/Tandon air	1	1	0	
18	Alat Dapur Lainya	1	1	0	
19	Televisi	1	1	0	
20	Loudspeaker	1	1	0	
21	Saundsystem	3	3	0	
22	Tangga alumunium	1	1	0	
23	Alat rumah Tangga Lainya	1	1	0	
24	Layar Film/Proyektor	1	1	0	
26	Telephone Mobil	1	1	0	
27	Laptop	5	5	0	
28	Printer	6	6	0	
VIII	**KELURAHAN GEGUNUNG KULON**				
1	Sepeda motor	3	3	0	
2	Alat angkutan darat bermotor lainya	1	1	0	
3	Penyemprot otomatis	3	3	0	
4	Lemari kayu	3	3	0	
5	Meja rapat	2	2	0	
6	Meja ½ biro	5	5	0	
7	Kursi tamu	1	1	0	
8	Kursi Putar	1	1	0	
9	Kursi Biasa	2	2	0	
10	Kursi Lipat	40	40	0	
11	Meja Kompiuter	1	1	0	
12	Lemari es	1	1	0	

13	AC sepilit	3	3	0	
14	Televisi	1	1	0	
15	Sound system	1	1	0	
16	Tangga alumunium	3	3	0	
21	Tangga aluminium	1	1	0	
22	Internet	1	1	0	
23	Laptop	4	4	0	
24	Printer	3	3	0	

1.2.6.TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN EVALUASI SAKIP 2023

Berikut Hasil Tindak lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP tahun 2023 Nomor 700/ 028D/LHE/INSP/2024 Tanggal 02 Juli 2024

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL PD
TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN REMBANG

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	OUT PUT		STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
			SATAUN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7
I	**Perencanaan Kinerja**					
1	a. Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu perihal penerbitan pedoman penyusunan dokumen rencana aksi akuntabilitas kinerja PD	Kami telah mengusulkan kepada unit organisasi pengampu	Laporan	telah mengusulkan kepada unit organisasi pengampu	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1RQhjT6R6NbEEvlQiSvjH0O5zK9wvr2G3/view?usp=sharing
	b. Melampirkan pedoman penyusunan dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja ,RKA PD	Kami telah melampirkan pedoman penyusunan dokumen renstra, perjanjian kinerja , RKA PD	Dokumen	SE penyusunan Renja Tahun 2023, penyusunan RKA SKPD surat penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKJIP Tahun 2023	Tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1iA5xK59-X3tHBUzP3YhsM9h_bqa1AQRu?usp=drive_link

2	Menyampaikan kembali dokumen Renstra yang telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal penetapan	Kami telah menyampaikan kembali dokumen renstra yang telah dilengkapi tanggal penetapan	Dokumen	Telahmelengkapi tanggal penetapan di dokumen Renstra	Tuntas	https://drive.google.com/file/d/1T3KuAOpFnsXVhWYb00TQTcyNB7_1O-4q/view?usp=drive_link
3	Publikasi dokumen pada web resmi kecamatan Rembang agar dibuat sesuai nama dokumen, tidak dikelompokkan di satu Link" Dokumen SAKIP"	Kami telah mempublikasikan dokumen pada web resmi Kecamatan Rembang sesuai nama dokumen	Dokumen	telah di uploud di Web Resmi Kecamatan Rembang	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1Yqg9FFZun2Q_yqkKSotglzUl0GK-OM4T?usp=drive_link
4	Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan (Perencanaan/Diklat) menyelenggarakan Bimtek penyusunan perjanjian kinerja/Pohon Kinerja	Kami telah mengusulkan kepada unit organisasi pengampu penunjang urusan pemerintahan penyelenggaraan Bimtek penyusunan perjanjian kinerja / pohon kinerja	Laporan	Telah mengusulkan tentang bimtek penyusunan Perjanjian kinerja/Pohon kinerja	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1_LkORWmFV6DlZoTs-gXA9XHj_tmzjW6Q/view?usp=drive_link
5	Memperbaiki pohon kinerja dengan memperhatikan faktor kunci atas kinerja yang ingin dicapai serta kaidah perjenjangan kinerja sesuai Peraturan	Memperbaiki Perjenjangan Kinerja/Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	dokumen	Uploud Pohon kinerja lama	dalam proses	https://drive.google.com/file/d/1m6I1qRNo2RT4VX8iFlVkEJX1AG9xoBFS/view?usp=drive_link

		Mentri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021					
6		Dalam penyusunan Renja,KUA,RKA maupun DPA ke depan (Perubahan Tahun 2024) agar konsisten, baik nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan baik indikator kinerja , target dan pagu anggaran	Kami akan konsisten dalam penyusunan Renja, KUA,RKA maupun DPA ke depan (Perubahan Tahun 2024) baik nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan baik indikator kinerja , target dan pagu anggaran	Dokumen	Dokumen Renja 2024 telah sesuai DPA Pergeseran 7	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1Pg5bc57wtjz8J2xJYrvhAj2Dz3i5rWGy?usp=drive_link
7	a.	Menambahkan sasaran sub kegiatan, indikator sub kegiatan beserta targetnya untuk perjanjian kinerja Pejabat Eselon IV Tahun 2024	kami telah Menambahkan sasaran sub kegiatan, indikator sub kegiatan beserta targetnya untuk perjanjian kinerja Pejabat Eselon IV Tahun 2024	Dokumen	Perjanjian kinerja pejabat eselon IV Tahun 2024 sudah dilengkapi sasaran sub kegiatan indikator sub kegiatan beserta targetnya	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/17Y5eJ2RK0bmdtehpPe4sKYe7BEs2EFQC?usp=drive_link

	b.	Menambahkan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Sub Kegiatan dan jadwal Monev pada Renaksi Tahun 2024	kami telah Menambahkan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Sub Kegiatan dan jadwal Monev pada Renaksi Tahun 2024	Dokumen	Rencana aksi sudah sesuai dengan rekomendasi	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/17Y5eJ2RK0bmdtehpPe4sKYe7BEs2EFQC?usp=drive_link
	c	Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK /Pejabat struktural maupun fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Kami akan Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana aksi dan pencapaian kinerja secara berkala dengan melibatkan seluruh PPTK /Pejabat struktural maupun fungsional yang diadministrasikan dan didokumentasikan secara tertib	Dokumen	Monitoring evaluasi kinerja telah dilaksanakan	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/17Y5eJ2RK0bmdtehpPe4sKYe7BEs2EFQC?usp=drive_link
II	**Pengukuran Kinerja**						
1		Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu (Bagian Adm Pembangunan Setda) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Kami telah Mengusulkan kepada unit organisasi pengampu (Bagian Adm Pembangunan Setda) perihal penerbitan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Laporan	sudah ada balasan dari OPD	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1IczisocA1U2tKCPBFKIMCmLtXuZCmlTI?usp=drive_link

2		Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan	Kami akan Melengkapi Profil Indikator Kinerja dengan definisi operasional program dan kegiatan	Dokumen	sudah membuat sebagian	belum tuntas	https://drive.google.com/file/d/1lWjTKCIabQcWSpCB_fZfv9ga86a_OpjO/view?usp=drive_link
3		Dalam pengambilan keputusan pada saat proses pengukuran kinerja organisasi diharapkan pimpinan senantiasa terlibat langsung dan didokumentasi/ diadministrasikan secara tertib	kami telah melibatkan secara langsung pimpinan dalam pengambilan keputusan pada saat prosese pengukuran kinerja organisasi dan mendokumentasikan secara tertib	Dokumen	telah melibatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1GPt1Vca3oL2yf5uDPAZ8yOvR11kK-Mb4?usp=drive_link
4		Melengkapi data hasil pengukuran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen LKjIP Tahun 2023 Bab III	kami telah melengkapi data hasil pengukuran kinerja program kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen LKjIP Tahun 2023 Bab III	Laporan	Laporan Evaluasi pelaksanaan kinerja Renja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1sJkLzhP1gsriVck_Vf8h1SHHtdSPEGUA?usp=drive_link
5		Menyusun laporan hasil monitoring /Evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan1 dan 2 Tahun 2024	Kami akan menyusun laporan hasilmonitoring / evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I dan 2 Tahun 2024	Dokumen	Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/19nmXPwCINCiha2tdfDuR5M28ZqRUe73X?usp=drive_link

6	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya fokus pada pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai pada sub kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkala (minimal triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	kami akan fokus dalam pengukuran capaian kinerja mulai dari sasaran, program, kegiatan sampai pada sub kegiatan hendaknya dilaksanakan secara berkala (minimal triwulanan) dengan melibatkan seluruh pejabat struktural termasuk PPTK selaku penanggungjawab sekaligus pengendali teknis kegiatan	Laporan	Laporan Evaluasi pelaksanaan kinerja Renja Triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1sJkLzhP1gsriVck_Vf8h1SHHtdSPEGUA?usp=drive_link
7	Masing masing Uit kerja (Sekretariat, Sub Bag dan Seksi) agar menyusun Laporan Kinerja secara berkala (Triwulan 1 s/d IV) dengan memedomani Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah ditetapkan	kami telah menyusun laporan kinerja secara berkala dari sekretariat, Sub Bagian dan Seksi dengan perpedoman pada rencana aksi tahun 2024 yang ditetapkan	Laporan	Laporan kinerja secara berkala telah disusun	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1OVs983hVIUAy8VMny9CJKTMKsaCcyY-9?usp=drive_link
III	**Pelaporan Kinerja**					

1	Memperbaiki Laporan Kinerja/LKjIP Tahun 2023 dengan menindaklanjuti 7 (Tujuh) Rekomendasi yang belum tuntas	kami telah memperbaiki laporan kinerja /LKjIP Tahun 2023 dengan menindaklanjuti 7 (tujuh) rekomendasi yang belum tuntas	Dokumen	LKJIP Tahun 2023 Telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/14IvyiM-G-R4X2Jql0j1UKVx1IdSTMoam/view?usp=drive_link
2	Melengkapi Dokumen LKjIP dengan informasi perbandingan realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kami telah Melengkapi Dokumen LKjIP dengan informasi perbandingan realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Dokumen	LKJIP Tahun 2023 Telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1UQMY6pA-3lcI3P7dzQCTTyF_t6orMBDF/view?usp=drive_link
3	Menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya	kami akan menyajikan perbandingan realisasi kinerja sejenis dengan perangkat daerah lainnya	Dokumen	LKJIP Tahun 2023 Telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1EMdNkTHodrSACXc-9OU-Cf07NZ1HJQQH/view?usp=drive_link
4	Menginformasikan analisa/ Penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat/ kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya upaya yang akan dilakukan	kami akan Menginformasikan analisa/ Penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat/ kendala atas kegagalan yang dihadapi beserta upaya upaya yang akan dilakukan	Dokumen	LKJIP Tahun 2023 Telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1Eq5W5OuDkxRJmSnvKXbIIm2CpCmjGmd8/view?usp=drive_link

5	Untuk Menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat Efisiensi = Realisasi Output/Realisasi Anggaran x 100%	kami telah Menghitung ulang efisiensi berdasarkan formulasi yang tepat	Dokumen	LKJIP Tahun 2023 Telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/19EPN4Vb-HD9yyE2dmknMSqqRaN9ukt3M/view?usp=drive_link
6	Secara berkala senantiasa melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategis untuk peningkatan inerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan /didokumentasikan secara tertib	kami akan melakukan konsolidasi internal sebagai upaya/strategis untuk peningkatan inerja dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat maupun kinerja pemerintah desa, yang diadministrasikan /didokumentasikan secara tertib	Dokumen	Dokumen rapat Kepala Desa telah diadministrasikan secara tertib	tuntas	https://drive.google.com/drive/folders/1lyYZtY8kCqTP34ubtwBbIxp_I4uegIJd?usp=drive_link

7	Bab III LKjIP agar menginformasikan analisa / Penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat /kendala atas kegagalan yang dihadapi, yang diselaraskan dengan Bab IV yang menjelaskan uapaya upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian keberhasilan kinerja peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan kinerja pemerintah desa	kami akan menginformasikan BAB III LKjIP analisa / Penjelasan faktor pendukung atas keberhasilan kinerja dan faktor penghambat /kendala atas kegagalan yang dihadapi, yang diselaraskan dengan Bab IV yang menjelaskan uapaya upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian keberhasilan kinerja peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan kinerja pemerintah desa	Dokumen	LKjIP Tahun 2023 telah direvisi	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1XpvgqPg2B9f6gecMdYOqBcFK8S1btMMJ/view?usp=drive_link
IV	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**					
	Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP	Kami akan Menyusun Rencana Aksi tindak lanjut rekomendasi atas hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP	Dokumen	Rencana aksi tindak lanjut rekomendasi penilaian mandiri SAKIP yang akan datang	tuntas	https://drive.google.com/file/d/1CUsaW_aFJHYG3SoAw2fd-pEAxDxgyKfP/view?usp=drive_link

Rembang, 30 Agustus 2024

CAMAT REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19821029 200112 1 002

Keterangan Pengisian :
Kolom 1. jelas
Kolom 2. diisi Rekomendaisi yang sudah diuraikan pada Dok. LHE SAKIP hasil PK APIP
Kolom 3. diisi aktifitas yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi
Kolom 4. diisi dengan satuan/jenis keluaran yang telah dihasilkan (Misal dokumen, laporan dsb)
Kolom 4. diisi dengan keluaran hasil tindak lanjut reviu (misal : Pohon Kinerja/aporan Kinerjs trilsn 2
Kolom 5. nama dokumen/laporan/output lain hasil tindak lanjut LHE SAKIP
Kolom 6. diisi Tuntas (jika selesai)/dalam proses (jika masihdalam penyelesain)/Belum ditindaklanjuti (jika sama sekali tid
Kolom 7 . diisi link hasil tautan dengan bukti dukung hasil TL LHE SAKIP (kolom 5)

1.2.7. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Rembang . Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Rembang :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024 induk	Tahun 2024 Perubahan
(1)	(1)	(2)	(3)	
5	Belanja Daerah			
5.1	**Belanja Operasi**	**8.149.851.500**	**7.838.279.529**	**7.657.487.948**
5.1.01	Belanja Pegawai	6.116.581.000	6.137.418.000	5.725.865.784
5.1.02	Belanja Barang Jasa	2.033.270.500	1.700.861.529	1.931.622.164
5.2	**Belanja Modal**	**561.571.500**	**917.172.471**	**529.172.926**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.571.500	4.172.471	17.172.926
5.2.03	Belanja Modal gedung dan Bangunan	500.000.000	315.000.000	315.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi		598.000.000	197.000.000
	Jumlah Belanja	**8.711.423.000**	**8.755.452.000**	**8.186.660.874**

Sumber : DPA SKPD Kecamatan Rembang

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Rembang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 000.8/0063/2025 Tentang Penyusunsn Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Tahun 2024

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rembang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2 Prestasi yang diraih
3 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Kantor Kecamatan Rembang Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:

a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Desa di Wilayah Kecamatan Rembang.

2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil dan Monografi Desa

c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

d. Pembinaan Dan Pengawasan dalam Validasi data aset desa

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:

a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:

a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan

b. Fasilitasi Forkompimcam.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Rembang yaitu Mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan yang dilengkapi dengan dukungan Pendanaan dari Pemerintah yang menjadi rujukan Agenda Pembangunan lima tahun ke depan. Visi Kepala Daerah tersebut dirumuskan dalam Visi Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu :

” Rembang Gemilang 2026.”

Dalam rangka mendukung dan membantu terwujudnya Visi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, kantor kecamatan Rembang menuangkan prioritas kinerjanya dalam ”Kecamatan Rembang Prioritas 2024” adapun rumusan ”Kecamatan Rembang Prioritas 2024 adalah:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat
2. Merajut Rembang sebagai kota wisata
3. Kebersihan dan Pengelolaan sampah
4. Tertib Administrasi Desa

Kecamatan Rembang Prioritas 2024 tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Rembang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional Guna Mendukung Kesuksesan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam pencapaian Visi dan Misinya.

b. Misi

Misi Kepala Daerah merupakan upaya dan tahapan diyakini dapat di dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Ada Empat (4) misi pembangunan Kabupaten Rembang 2021-2026 :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut kecamatan Rembang sebagai perangkat daerah yang berfungsi membantu bupati dalam menjalankan Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat.

Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah dan tidak secara langsung menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan maka ada beberapa tujuan yang berkaitan erat yang harus dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan misi tersebut. Uraian tugas pokok dan fungsi kecamatan lebih erat kaitanya dengan pelayan kepada masyarakat, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pelindungan sosial, keamanan dan ketertiban yang harus diselenggarakan di desa.

Tujuan dan sasaran misi I (satu) pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu untuk "Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi" maka berdasarkan tujuan tersebut maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yangprofesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tujuan dan sasaran misi II (dua) yaitu :

"Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial" maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian

Tujuan Misi II yaitu:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

Tujuan dan sasaran misi III (tiga) yaitu "Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan", maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi III adalah:

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, sepertipertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai

Tujuan dan sasaran misi IV (empat) yaitu "Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal", maka berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi IV yaitu :

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan Rembang mempuntai tugas pokok membatu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan kewenangan Bupati serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026 terdapat 4 tujuan serta 3 sasaran strategis.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Rembang, yaitu :

1. Mewujudkan Kantor Kecamatan Rembang sebagai tempat pelayanan yang representatif.
2. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dengan didukung Aparatur yang profesional dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengembangkan sarana prasarana perkantoran yang memadahi kepentingan publik.
4. Menurunkan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Rembang.

Guna mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada msyarakat (pelayanan Prima).
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan.
3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

Tujuan dari Kecamatan Rembang adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rembang:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	1.1.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik	0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
				Indeks kepuasan Masyarakat	0	83	83,5	84	85	86

Sumber : Renstra Kecamatan Rembang Tahun 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	11	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Untuk mengukur kinerja pelayanan public di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang	**Nilai Indek = ∑(nilai aspek n x bobot aspek n)**	Olahan Data OPD
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	2.1.	Indeks kepuasan masyarakat	angka	Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kecamatan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ per\ Unsur}{Total\ unsur\ yg\ terisi} x$ *Nilai Penimbang*	Olahan Data OPD

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rembang Tahun 2024

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Rembang

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KECAMATAN REMBANG

TAHUN 2024

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Tujuan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Sasaran Strategis	Target Sasaran	PROGRAM	Indikator Program	Target Program	KEGIATAN	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	SUB KEGIATAN	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Anggaran Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik**	**Indeks Pelayanan Publik /IPP**	**3.3**	**Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM**	**84**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Nilai SAKIP OPD	62	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	5,899,218,000
													Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	49,200,000
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1,000,000

													Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3,000,000
													Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	26,000,000
													Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	2,925,000
													Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	10,000,000
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	34,460,000
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	98,579,000

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	85%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	4,950,000
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	8,120,000
													Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	635,000,000
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	5,000,000

							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ keluraha n untuk pemberdayaan masyarkat	100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola	100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	30,000,000
													Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	99,000,000
										Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	61.5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1	300,000,000
													Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	1,500,000,000

							PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100 %	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	44,000,000
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	95%	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	70	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		5,000,000

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Rembang tahun 2024

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Kecamatan Rembang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3,3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	84

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	62	Sekcam
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**95 %**	**Kasubag Progkeu**
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**	**100**	**Kasubag Progkeu**
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen kepegawaian**	**100**	**Kasubag Umpeg**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		yang dikelola dengan baik		
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% pemenuhan pelayanan umum**	100	**Kasubag Umpeg**
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**Kasubag Umpeg**
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% BMD Dengan Kondisi Baik**	**85**	**Kasubag Umpeg**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat**	**100**	**Kasi P3**
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100**	**Kasi P3**
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase PemDes yang lunas bayar PBB**	**100**	**Kasi P3**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat**	100	Kasi PM
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	27	
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani**	100	Kasi PM
3.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-Rata IKM Kelurahan		Kelurahan
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan**	**100**	**Kasi Trantibum**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pengampu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ketertiban umum		
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum**	**100**	**Kasi Trantibum**
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**	**95**	**Kasi Binwas**
5.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rata-rata IKM Desa**	**70,5**	**Kasi Binwas**

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Rembang :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kecamatan Rembang Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	62	6.772.452.000	6.356.070.908
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**95 %**	**-**	**-**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	-	-
1.1.2	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	-	-
1.1.3	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	-	-
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**	**100**	**5.948.418 .000**	**5.725.865 .784**
1.2.1	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	5.899.218. 000	5.683.205. 784
1.2.2	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	49.200.00 0	42.660.00 0
1.2.3	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	-	-
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik**	**100**	**-**	**-**
1.3.1	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	-	-
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**% pemenuhan pelayanan umum**	100	42.925.00 0	43.745.12 4
1.4.1	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	1.000.000	1.000.000
1.4.2	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	3.000.000	4.746.250

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.4.3	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	26.000.000	23.000.000
1.4.5	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12	2.925.000	4.998.874
1.4.6	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	12		
1.4.7	*Penyediaan Bahan/Material*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	12	10.000.000	10.000.000
1.4.8	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	-	-
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**100**	**133.390.000**	**161.390 000**
1.51	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12		
1.5.2	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	12	34.460.000	45.460.000
1.5.2	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12	98.579.000	115.930.000
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**% BMD Dengan Kondisi Baik**	**85**	**648.070.000**	**425.070.000**
1.6.1	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16	4.950.000	4.950.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.6.2	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20	8.120.000	8.120.000
1.6.3	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4	635.000.000	412.000.000
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat**	**100**	**5.000.000**	**97.000.000**
2.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**100**	**-**	**92.000.000**
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	-	92.000.000
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase PemDes yang lunas bayar PBB**	**100**	**5.000.000**	**5.000.000**
2.2.1	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12	5.000.000	5.000.000
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat**	100	1.929.000.000	1.693.389.966
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	27		
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani**	100	129.000.000	108.810.500
3.1.1	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum*	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	10	30.000.000	11.495000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan			
3.1.2	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	99.000.000	97.315.500
3.2	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Rata-Rata IKM Kelurahan	61	1.800.000.000	1.584.579.466
3.2.1	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10		
3.2.2	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1	300.000.000	108.000.000
3.2.3	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	10	1.500.000.000	1.476.579.466
3.2.4	*Evaluasi Kelurahan*	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	12		
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	**44.000.000**	**35.200.000**
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum**	**100**	**44.000.000**	**35.200.000**
4.1.1	*Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	34	44.000.000	35.200.000

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran Induk	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**	**95**	**5.000.000**	**5.000.000**
5.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Rata-rata IKM Desa**	**70,5**	**5.000.000**	**5.000.000**
5.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34	5.000.000	5.000.000

Sumber : DPA Kecamatan Rembang Tahun 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Rembang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Rembang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Rembang .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Rembang tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**Tujuan**						
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	3.3	4,47	135%	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
2	**Sasaran**						
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	84	91,63	109%	Sangat Tinggi	

Sumber : Renstra 2021-2026 dan survey IKM

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian kinerja perjanjian kinerja tahun 2024 pada kecamatan Rembang sudah sesuai dari target yang telah di rencanakan yaitu dengan realisasi 4,47 dari target 3.3 dengan capaian persentase 135% sedangkan pada Indeks Pelayanan Publik dengan persentase capaian sebesar sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 91,63 dari target 84 sehingga capaian persentase sebesar 109% jika melihat capaian diatas maka pada Kecamatan Rembang dalam kategori Sangat tinggi

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan**							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	Na	3,27	4,39	3,3	4,47	135%
2	**Sasaran**							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM	82,98	84,19	86,7	84	91,63	109%

Sumber : Renja 2024

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023 dengan capaian persentase sesuai dengan target yang direncanakan mencapai 135 %.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Rembang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	**Tujuan**				
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/IPP	4,47	3,5	78,29 %
2	**Sasaran**				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,63	85	92,76

Sumber : renja 2024

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan Tabel diatas capaian tahun 2024 dan target akhir tahun 2026 mengalami tingkat kemajuan hampir mencapai 92,76 % peningkatan terlihat bahwa tahun 2024 dengan nilai indeks Kepuasan masyarakat mendapatkan nilai 91,63 diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat menggunakan aplikasi e-SKM yang ditunjukkan kepada pengguna layanan dengan responden penerima layanan kurang lebih 100 orang responden dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik. kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Rembang yaitu :

1. Persyaratan : dengan nilai 3,64
2. Sistem, mekanisme dan prosedur nilai 3,66
3. Waktu penyelesaian nilai 3,54
4. Biaya/ Tarif nilai 3,98
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan nilai 3,61
6. Kompetensi pelaksana nilai 3,59
7. Perilaku pelaksana nilai 3,66
8. Penanganan pengaduan saran dan masukan nilai 3,5
9. Sarana dan Prasarana nilai 3,84

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Perangkat Daerah Lain

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Kecamatan lain diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Penyandingan Realisasi Kinerja Kecamatan se-Kabupaten Rembang
Tahun 2024

No.	Kecamatan	IKM	SAKIP	
			Nilai	Predikat
1	Rembang	91,63	65,90	B
2	Lasem	97.7	68.69	B
3	Gunem	87.3	65.26	B
4	Sluke	90.97	69.41	B
5	Sumber	88.61	64.41	B
6	Sarang	94.84	63.41	B
7	Kragan	97.53	67.15	B
8	Kaliori	82.36	62.91	B
9	Pamotan	77,20	64,81	B
10	Bulu	83.28	64.35	B
11	Sedan	87.3	65.96	B
12	Pancur	89.72	61.35	B
13	Sale	81.39	64.56	B
14	Sulang	82,94	62.00	B

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Tujuan							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik/ IPP	135		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Berhasil	
	Sasaran							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	109		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM		Berhasil	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**Nilai SAKIP OPD Kec. Rembang**	**106**	Berhasil	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	Berhasil	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100	Berhasil	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100	Berhasil	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	100	Berhasil	
				Penyediaan Jasa Penunjang	% pemenuhan pelayanan	100	Berhasil	

				Urusan Pemerintahan Daerah	administrasi perkantoran			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD Dengan Kondisi Baik	100	Berhasil	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat**	**100**	Berhasil	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**100**	Berhasil	
				Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PemDes yang lunas bayar PBB	100	Berhasil	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat**	**100**	Berhasil	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	Berhasil	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rata-Rata IKM Kelurahan	139	Berhasil	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum**	**100**	Berhasil	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentrama	100	Berhasil	

				Ketertiban Umum	n dan keindahan)			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa**	**100**	Berhasil	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa			

Sumber : renja 2024

Uraian penjelasan tabel :

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kantor Kecamatan Rembang pada Tahun 2024 tidak mencapai target secara maksimal. Hal yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja pengelolaan Keuangan maupun kinerja pencapaian target Program/Kegiatan adalah keterbatasan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten Rembang khususnya untuk Kecamatan Rembang yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa masalah yang mempengaruhi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan dan kinerja pencapaian target Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang menyedot anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. Belum optimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan.

2. Melakukan efisiensi anggaran, dengan cara memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang tidak disediakan anggaran ataupun mengalami pemangkasan anggaran.
4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran, sebagaimana rumus dibawah ini :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi))} \times 100\%$$

Keterangan :
E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
RAKi : Realisasi Anggaran keluaran i
Cki : Capaian Keluaran i

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan**							
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	3,3	4,47	135	8.186.660.874	7.938.597.483	96,96	Efisien
2	**Sasaran**							
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	84	91,63	109	8.186.660.874	7.938.597.483	96,96	efisien

Sumber : DPPA Kecamatan Rembang

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan Tabel diatas Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sudah efisien dengan anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Rembang setelah pergeseran adalah Rp 8.186.660.874,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.938.579.483,- dan capaian realisasi 96.96%.

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Anggaran APBD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8 (4/6*100)	8 (5/7*100)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	53	5,683,205,784	*5,518,496,409*	**0.00000%**	**0.00000%**

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	42,660,000	*42,660,000*	**0.00003%**	**0.00003%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik**						
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	3				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**% pemenuhan pelayanan umum**						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	12	*1,000,000*	*897,300*	**0.00120%**	**0.00134%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	*4,746,250*	*3,526,500*	**0.00025%**	**0.00034%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	*23,000,000*	*21,353,000*	**0.00005%**	**0.00006%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	12	12	*4,998,874*	*3,423,800*	**0.00024%**	**0.00035%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan*	12	12				
	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	12	12	*10,000,000*	*9,999,000*	**0.00012%**	**0.00012%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	12				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12	12				

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	12	12	*45,460,000*	*40,724,361*	**0.00003%**	**0.00003%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*	12	12	*115,930,000*	*114,461,875*	**0.00001%**	**0.00001%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% BMD Dengan Kondisi Baik**						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	16	16	*4,950,000*	*3,246,000*	**0.00032%**	**0.00049%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20	20	*8,120,000*	*6,045,000*	**0.00025%**	**0.00033%**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4	4	*412,000,000*	*391,661,414*	**0.00000%**	**0.00000%**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke camat**						
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani**						
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan peerintahan di tingkat kecamatan				92,000,000	91,999,900	**0.00000%**	**0.00000%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12	12	*5,000,000*	*4,704,200*	**0.00024%**	**0.00026%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Jumlah desa dengan swadayamasyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-**						

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	10	10	*11,495,000*	*11,492,200*	**0.00009%**	**0.00009%**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	*97,315,500*	*94,498,450*	**0.00001%**	**0.00001%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase pengelolaan APB Kelurahan yang akuntabel**						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	70	**70**				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	49	**49**	108,000,000	*104,226,854*	**0.00005%**	**0.00005%**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	70	**70**	1,476,579,466	*1,440,021,220*	**0.00000%**	**0.00000%**
	Evaluasi Kelurahan	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan*	84	**84**				
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum**						
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum**						

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	34	**34**	*35,200,000*	*31,650,000*	**0.00010%**	**0.00011%**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**						
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Rata-rata IKM Desa**						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	34	**34**	*5,000,000*	*2,250,000*	**0.00068%**	**0.00151%**
						Rata Rata	**0.00014%**	**0.00019%**

Sumber : DPPA Kec Rembang Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Jika melihat table diatas perbandingan antara efisiensi realisasi sebesar 0.00014 % dan efisiensi anggaran sebesar 0,00019% maka pada saat pelaksanaan lebih efisien. Meski dengan keterbatasan anggaran Kecamatan Rembang mampu mencapai target yang telah ditetapkan, adapun seperti di program Ketertraman dan ketertiban tidak bisa tercapai 100 % dikarenakan tidak bisa direalisasikan oleh BPPKAD Kabupaten Rembang

3.1.8 **Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**.

Analisis program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel di bawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2024	Capaian 2024	Menunjang / Tidak Menunjang	Formulasi
1	**2**	3	4	7	8	9	10	9
	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik/IPP	**angka**	3.3	4,47	**M**	Nilai Indeks : ∑ (Nilai Aspek$_n$ X Bobot Aspek$_n$)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	**angka**	83,5	91,63	M	{ Total dari Nilai Persepsi per Unsur / (25) X Nilai Penimbang X Nilai Dasar }
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai SAKIP OPD**	Angka	62	65,90	**M**	Jumlah Nilai komponen (Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi) (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
		1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**95**	**100**	M	Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD / Jumlah seluruh urusan perencanaan X 100

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Dok	2	2	M	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	2	2	M	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	4	4	M	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik**	**%**	**100**	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Keuangan OPD / Jumlah seluruh urusan Admonistrasi Keuangan OPD X 100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	53	53	M	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	M	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	1	1	M	
		3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Persentase dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik**	**%**	**100**	100	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Kepegawaian OPD / Jumlah seluruh urusan Administrasi Kepegawaian OPD X 100
		Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dok	3	3	M	

		Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian					
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**% pemenuhan pelayanan umum**	**%**	**100**	**100**	M	Jumlah pelaksanaan urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah / Jumlah seluruh urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah X 100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	M	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	12	M	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	M	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	M	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	12	M	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	M	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan urusan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah / Jumlah seluruh urusan penyecdia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	12	12		
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**% BMD Dengan Kondisi Baik**	**%**	**85**	**100**		Jumlah pelaksanaan urusan Pemeliharaan Barang Milik daerah / Jumlah seluruh urusan Pengadaan Barang Milik Daerah X 100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	16		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	20		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	4	4		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik / Jumlah seluruh Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik X 100
		Koordinasi Penyelenggaraan	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tdk dilaksanakan oleh Unit Kerja OPD / Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg tdk dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah X 100

		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Lap**	**1**	**1**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	%	100	100		Jumlah pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat X 100 Jumlah seluruh urusan Pemerintahan yg dilimpahkan kepada Camat
		1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Lap	12	12		
		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	**Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarkat**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan X 100 Jumlah seluruh Program Pemberdayaan MasyarakatDesa dan Kelurahan
		1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Pembardayaan Desa X 100 Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	lembaga	10	10		

		Pembangunan di Desa	Pembangunan di Kelurahan					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	12	12		
		2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Rata-Rata IKM Kelurahan**	**angka**	**61,5**	**85,19**		Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Pembardayaan Kelurahan / Jumlah seluruh urusan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan X 100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga	10	10		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	1	1		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokma s	10	10		
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lap	12	12		
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**persentase penyelesaian permasalahan**	**%**	**100**	**100**		Jumlah pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum / Jumlah seluruh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum X 100

			ketentraman dan ketertiban umum					
		1. Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	%	100	100		Jumlah pelaksanaan urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib / Jumlah seluruh urusan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantib X 100
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Lap	34	34		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik**	**%**	**95**	**100**		Jumlah pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Jumlah seluruh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa X 100
		1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	Angka	70,50	0		Jumlah pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa / Jumlah seluruh Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa X 100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dok	34	34		

Sumber : DPPA Kec Rembang Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:
Masalah yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2024 antara lain :

1. Adanya refocusing anggaran yang memangkas sejumlah pagu anggaran kegiatan dan kenaikan gaji PNS 8% yang mempengaruhi anggaran APBD.
2. Perencanaan Anggaran yang berbasis kinerja yang belum sempurna karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Rembang.
3. lebih mengoptimalnya koordinasi internal OPD dalam melaksanakan tahapan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang terus akan dilakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengevaluasi Perencanaan
2. Melaksanakan bintek kemampuan dasar pegawai
3. Meningkatkan kekompakan dan koordinasi internal kecamatan
4. Menjaga stabilitas kinerja di kecamatan

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	2	3	4	5.00
	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN	**8,186,660,874**	**7,937,337,483**	**96.95**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6,356,070,908**	**6,156,494,659**	96.86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,725,865,784**	5,561,156,409	97.12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,683,205,784	*5,518,496,409*	97.10
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42,660,000	*42,660,000*	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**43,745,124**	39,199,600	89.61

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*1,000,000*	*897,300*	89.73
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*4,746,250*	*3,526,500*	74.30
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*23,000,000*	*21,353,000*	92.84
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*4,998,874*	*3,423,800*	68.49
	Penyediaan Bahan/Material	*10,000,000*	*9,999,000*	99.99
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**161,390,000**	155,186,236	96.16
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*45,460,000*	*40,724,361*	89.58
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*115,930,000*	*114,461,875*	98.73
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**425,070,000**	400,952,414	94.33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*4,950,000*	*3,246,000*	65.58
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*8,120,000*	*6,045,000*	74.45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*412,000,000*	*391,661,414*	95.06
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**97,000,000**	**96,704,100**	99.69
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan peerintahan di tingkat kecamatan	**92,000,000**	**91,999,900**	0.00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**92,000,000**	**91,999,900**	0.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**5,000,000**	**4,704,200**	**94.08**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*5,000,000*	*4,704,200*	94.08
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**1,693,389,966**	**1,650,238,724**	97.45
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	108,810,500	105,990,650	97.41
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*11,495,000*	*11,492,200*	99.98
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*97,315,500*	*94,498,450*	97.11
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,584,579,466	1,544,248,074	97.45
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			**0.00**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**108,000,000**	***104,226,854***	**96.51**
	Kelurahan Leteh	108,000,000	*104,226,854*	96.51
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	**1,476,579,466**	**1,440,021,220**	**97.52**
	Kelurahan Kutoharjo	165,000,000	*161,666,450*	97.98

	Kelurahan Sidowayah	238,000,000	*234,059,967*	98.34
	Kelurahan Tanjungsari	196,000,000	*194,665,301*	99.32
	Kelurahan Pacar	140,000,000	*137,718,797*	98.37
	Kelurahan Gegunung Kulon	217,000,000	*209,635,175*	96.61
	Kelurahan Leteh	356,579,466	*341,092,650*	95.66
	Kelurahan Magersari	164,000,000	*161,182,880*	98.28
	Evaluasi Kelurahan	-	-	0.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**35,200,000**	**31,650,000**	89.91
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35,200,000	31,650,000	89.91
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*35,200,000*	*31,650,000*	89.91
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**5,000,000**	**2,250,000**	45.00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,000,000	2,250,000	45.00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*5,000,000*	*2,250,000*	45.00

Sumber : DPA Kecamatan Rembang

Uraian penjelasan tabel:

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran sebanyak 5 program 10 Kegiatan dan 22 sub kegiatan Kantor Kecamatan Rembang TA 2024, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rembang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Rembang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.186.660.874,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 7.937.337.483,- dengan serapan dana APBD mencapai 96,95%.

3.3 Prestasi yang dicapai

Prestasi yang dicapai Kecamatan Rembang pada Tahun 2024 yaitu Piagam Penghargaan Pada Kantor Kelurahan Leteh Kecamatan Rembang sebagai Juara II pada Penghargaan " REMBANG INNOVATION AWARD " Tahun 2024 INOVASI " CANTIKA (Chat Assistant Kopi Lelet Mantap"

3.4 Inovasi yang telah dilaksanakan

10. Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Pelayanan Publik Kecamatan Rembang “ MENYAPA” yaitu Pelayanan Mudah, Efektif, Nyaman, Akurat, Prosedur Sederhana dan Akuntabel Pelayanan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai inovasi pelayanan public.
11. Inovasi “KOPI LELET MANTAP” adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga secara mudah, cepat dan tanpa biaya alias gratis.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Rembang Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Rembang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Rembang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2024 ini Kecamatan Rembang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Rembang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2024 realisasi kinerja melapaui target dengan capaian 109 % meningkat dibanding tahun lalu yaitu 104 %
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan mendukung kinerja kecamatan ditentukan oleh beberapa factor antara lain adanya anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, kerjasama dan partisipasi semua pihak terkait. Dengan harapan keberhasilan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa yang akan datang.
3. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Rembang adalah:

   - Adanya koordinasi yang melibatkan camat dan semua kepala seksi, kepala sub bagian dan aparataur Kecamatan Rembang dalam pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.

- Ketersediaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan perencanaan, penatausahaan keuangan dan evaluasi kinerja.

4. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Kecamatan Rembang adalah:
   - Minimnya dukungan anggaran pelaksanaan fasilitasi pelayanan minimnya dukungan anggaran pelaksanaan fasilitasi pelayanan adminduk;
   - Sarana dan Prasarana Kecamatan Rembang kurang memadai;
   - Banyaknya kegiatan yang harus difasilitasi (PBB, Posyandu, Penanggulangan Kemiskinan, stunting dll) dan tidak mendapatkan dukungan anggaran;
   - Jumlah pegawai di Kecamatan Rembang semakin berkurang karena banyak pegawai pensiun;
   - Rendahnya kemampuan SDM kecamatan yang perlu ditingkatkan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan di tahun depan oleh Kecamatan Rembang adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyusun perencanaan sebaiknya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, sehingga masing-masing seksi bisa sepenuhnya menyusun kebutuhan anggarannya secara optimal sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing seksi.
2. Banyaknya aplikasi yang harus digunakan dalam hal perencanaan dan penatausahaan keuangan yang selalu berubah dari tahun ke tahun menjadikan kendala dalam hal percepatan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Rembang, maka diharapkan pegawai yang terlibat dalam perencanaan dan keuangan harus lebih sigap, cepat dan tanggap serta punya minat untuk belajar baik secara online maupun melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pelaksanannya.
3. Banyaknya pegawai di Kantor Kecamatan Rembang yang akan memasuki purna tugas, maka kebutuhan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang.

4. Camat dan unsur pimpinan harus lebih proaktif dan komunikatif serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penatausahaan keuangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Rembang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Rembang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Rembang, 27 Maret 2025

CAMAT REMBANG

ABDUR ROUF, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19821029 200112 1 00 2

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Tim Penyusun LKJIP

Lampiran 2 Dokumen Renstra (5 tahun)

Lampiran 3 Dokumen Renja Tahun 2024

Lampiran 4 DPA Induk Tahun 2024

Lampiran 5 DPPA Pergeseran 8 Tahun 2024

Lampiran 6 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Lampiran 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Lampiran 8 Laporan realisasi dan capaian indicator per triwulan 2024

Lampiran 9 SK IKU Kecamatan Rembang

Lampiran 10 Cascading Kecamatan Rembang

Lampiran 11 SK Peta Jabatan Kecamatan Rembang

Lampiran 12 Profil Indikator Kinerja

Lampiran 13 SK SOP Pengumpulan Data Kinerja

Lampiran 14 Realisasi Anggaran 2024

Lampiran 15 IKPD Kecamatan 2024

Lampiran 16 LHE SAKIP Kecamatan Rembang Tahun 2023

Lampiran 17 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Lampiran 18 Proses Bisnis Kecamatan Rembang

Lampiran 19 Bezeting ASN Kecamatan Rembang

Lampiran 20 RKT 2025